

**HUBUNGAN ANTARA RESILIENSI DENGAN HARGA DIRI PADA  
WARGA BINAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

**Arimbi Khoirinisa<sup>1</sup>, Dian Veronika Sakti Kaloeti<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. M. Sunario, Tembalang, Semarang, 50725

*E-mail:* [arimbikhoirinisa16@gmail.com](mailto:arimbikhoirinisa16@gmail.com)

**ABSTRAK**

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan kasus tindak pidana korupsi menghadapi tekanan psikologis yang kompleks akibat hilangnya kebebasan, status sosial, serta munculnya stigma sosial yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara resiliensi dengan harga diri pada warga binaan kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Subjek penelitian berjumlah 58 WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari beberapa LPP di Pulau Jawa dengan pendekatan total sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala resiliensi (23 aitem;  $\alpha = 0.945$ ) dan skala harga diri (27 aitem;  $\alpha = 0.953$ ) yang merupakan skala konstruksi. Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa resiliensi memprediksi harga diri secara signifikan ( $\beta = 0.718$ ,  $SE = 0.111$ ;  $t(56) = 0.001$ ;  $p < 0.001$ ). Model regresi secara keseluruhan signifikan,  $F(1, 56) = 41.57$ ,  $p < 0.001$ , dengan kemampuan menjelaskan varians sebesar 42.6% ( $R^2 = 0.426$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi resiliensi yang dimiliki WBP, perempuan kasus tindak pidana korupsi maka semakin tinggi pula harga dirinya. Analisis deskriptif juga menunjukkan mayoritas partisipan memiliki tingkat resiliensi dan harga diri pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa resiliensi berperan penting dalam pembentukan harga diri pada WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

**Kata kunci:** resiliensi; harga diri; Warga Binaan Pemasyarakatan; tindak pidana korupsi; perempuan.

**THE RELATIONSHIP BETWEEN RESILIENCE AND SELF-ESTEEM  
AMONG FEMALE CONVICTED OF CORRUPTION  
IN A WOMEN'S CORRECTIONAL FACILITY**

**Arimbi Khoirinisa<sup>1</sup>, Dian Veronika Sakti Kaloeti<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Faculty of Psychology Diponegoro University**

Jl. Prof. M. Sunario, Tembalang, Semarang, 50725

E-mail: [arimbikhoirinisa16@gmail.com](mailto:arimbikhoirinisa16@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Female correctional inmates convicted of corruption offenses face complex psychological pressures resulting from the loss of freedom, social status, and the emergence of social stigma, all of which may affect their psychological well-being. This study aimed to examine the relationship between resilience and self-esteem among female inmates convicted of corruption offenses in Women's Correctional Facility. The participants consisted of 58 female inmates convicted of corruption offenses from several Women's Correctional Facility in Java, selected using a total sampling approach. The research instruments included a resilience scale (23 items;  $\alpha = 0.945$ ) and a self-esteem scale (27 items;  $\alpha = 0.953$ ), both of which were researcher-developed measures. Hypothesis testing using simple linear regression analysis revealed that resilience significantly predicted self-esteem ( $\beta = 0.718$ ,  $SE = 0.111$ ;  $t(56) = 0.001$ ,  $p < 0.001$ ). The overall regression model was significant,  $F(1, 56) = 41.57$ ,  $p < 0.001$ , explaining 42.6% of the variance in self-esteem ( $R^2 = 0.426$ ). These findings indicate that higher levels of resilience are associated with higher levels of self-esteem among female inmates convicted of corruption offenses. Descriptive analysis further showed that the majority of participants demonstrated high levels of both resilience and self-esteem. The findings suggest that resilience plays an important role in the development and maintenance of self-esteem among female inmates convicted of corruption offenses during their rehabilitation period in Women's Correctional Facility.*

**Keywords:** *resilience; self-esteem; correctional inmates; corruption offenses; women.*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem pemasyarakatan merupakan wujud komitmen negara hukum dalam memastikan bahwa proses pemidanaan berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar hukuman (D. Rahmat dkk., 2021). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan UU No. 12 Tahun 1995, yang didalamnya menjelaskan bahwa sistem ini tidak hanya menjadi tempat untuk pembalasan atau penebusan atas kejahatan yang telah dilakukan, namun juga sebagai tempat perbaikan dan rehabilitatif. Tujuan utama masa hukuman adalah untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan pada akhirnya dapat kembali menjadi warga negara yang produktif dan berinteraksi secara sosial. Hal ini menjadikan Sistem Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*punishment*), tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan (*treatment*) dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak-hak WBP (Widyawati dkk., 2025). Sistem Pemasyarakatan sendiri mengelola total populasi WBP di seluruh Indonesia yang mencapai angka sangat tinggi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Dalam total populasi tersebut, terdapat kesenjangan gender yang signifikan, dimana WBP laki-laki lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan WBP perempuan. Meskipun warga binaan perempuan merupakan kelompok minoritas secara kuantitas, yaitu sejumlah 14.007 orang dari total populasi, keragaman jenis kejahatan serta tantangan pembinaan yang mereka hadapi cukup kompleks dan tidak dapat diabaikan. WBP perempuan tidak hanya terlibat dalam kejahatan konvensional, tetapi sering kali terjerat dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi sosial dan psikologis yang

unik, seperti kasus narkoba, terorisme, atau bahkan kasus tindak pidana korupsi (Fatony dkk., 2015).

Salah satu jenis kejahatan yang dilakukan oleh WBP perempuan yaitu kasus tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, yang secara tegas menyatakan bahwa kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara dan menghambat pembangunan, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan bernegara (Sriwidodo, 2019). Karakteristiknya yang terstruktur dan sistematis secara fundamental menghancurkan kepercayaan publik dan keadilan sosial. Kasus tindak pidana korupsi sendiri diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime* karena dampak kerusakannya tidak hanya sekadar masalah finansial saja (Friedrichs, 2010). Jenis kejahatan ini umumnya dilakukan oleh individu-individu terhormat dengan status sosial tinggi dan memiliki kekuasaan atau kepercayaan (*trusted position*) di lingkungan pekerjaan atau politik mereka, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi atau kelompok (Sari & Ritonga, 2023). Karakteristik ini membedakan pelaku korupsi dari sebagian besar pelaku tindak pidana lainnya karena mereka sering kali memiliki status sosial, ekonomi, dan pendidikan yang lebih tinggi sebelum menjalani masa pidana.

Meskipun pemidanaan merupakan hal yang penting bagi keadilan, namun proses penahanan dan transisi dari kehidupan di luar ke lingkungan pemasyarakatan akan memicu dampak psikologi yang mendalam bagi warga binaan khususnya perempuan, salah satunya tekanan ekstrem akibat kehilangan kebebasan (Cunha dkk., 2023). Bagi kelompok ini, proses pemidanaan tidak hanya berarti kehilangan kebebasan fisik sebagaimana yang dialami warga binaan pada umumnya, tetapi juga diikuti oleh hilangnya berbagai atribut sosial yang sebelumnya melekat pada diri mereka. Jabatan, keistimewaan, pengaruh sosial, penghormatan masyarakat, serta identitas profesional yang selama ini menjadi sumber penghargaan diri dapat

hilang dalam waktu yang relatif singkat setelah kasus hukum yang dihadapi terungkap. Kondisi tersebut dapat memunculkan krisis identitas karena individu harus menyesuaikan kembali cara memandang dirinya ketika status dan peran sosial yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas dirinya tidak lagi dimiliki (Meilya dkk., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa identitas personal dan identitas sosial memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan psikologis individu selama menjalani masa pemenjaraan. Oleh karena itu, perubahan identitas yang drastis dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai tekanan psikologis (Haesen dkk., 2018).

Kemudian, dinamika psikologis WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi juga dapat dikaitkan dengan munculnya *post-power syndrome*. *Post-power syndrome* merupakan kondisi psikologis yang muncul ketika individu mengalami kehilangan jabatan, kekuasaan, status sosial, atau posisi penting yang sebelumnya dimiliki. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya perasaan kehilangan makna hidup, penurunan kepercayaan diri, kecemasan, stres, rasa malu, hingga kesulitan menerima perubahan peran sosial (Nafeesa, 2012). Pada WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi, pengalaman kehilangan jabatan dan status sosial akibat proses hukum serta ppidanaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis yang signifikan. Individu yang sebelumnya memiliki otoritas, pengaruh sosial, atau pengakuan masyarakat harus menghadapi kenyataan bahwa identitas sosialnya berubah secara drastis dalam waktu relatif singkat. Rahmat (2016) menjelaskan bahwa individu yang mengalami *post-power syndrome* cenderung menunjukkan perubahan psikologis dan sosial setelah kehilangan posisi atau kekuasaan yang sebelumnya dimiliki.

Selain kehilangan status sosial dan munculnya *post-power syndrome*, WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi juga menghadapi stigma sosial yang kuat dari lingkungan sekitarnya. Korupsi merupakan kejahatan yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat dan media sehingga pelakunya sering kali menerima pelabelan negatif yang berkepanjangan

(Maruna, 2011). Ketika kasus tindak pidana korupsi, terutama kasus yang melibatkan pemimpin perempuan atau tokoh publik yang sebelumnya berada di puncak hierarki sosial dan memegang kehormatan, mereka akan mengalami pukulan psikologis yang parah ketika kehormatan dan kekuasaan tersebut dicabut secara paksa (Meilya dkk., 2020). Krisis status yang mereka alami adalah yang paling mendalam, yang mana citra diri bertahun-tahun yang telah dibangun runtuh secara tiba-tiba. Mereka bertransisi dari penguasa menjadi terpidana dan menghadapi “status orang luar” (*outsider status*) yang ekstrem (Morgan & Leeson, 2023), yaitu terisolasi, baik dari masyarakat Lembaga Pemasyarakatan yang didominasi kejahatan konvensional, maupun masyarakat luar yang biasanya akan memberikan penghakiman. Salah satu hal yang menarik dari kasus tindak pidana korupsi yaitu latar belakang pendidikan tinggi dan koneksi politik yang dulunya menjadi kelebihan, kini tidak relevan atau bahkan menjadi beban di lingkungan pemasyarakatan, yang membuat mereka kekurangan mekanisme coping atau penyesuaian diri dibandingkan WBP lainnya.

Meskipun pemasyarakatan bertujuan untuk membina dan merehabilitasi warga binaan, proses adaptasi terhadap kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan tetap menjadi pengalaman yang penuh tekanan. Peralihan dari kehidupan bebas menuju lingkungan yang memiliki berbagai aturan dan pembatasan dapat memunculkan stres psikologis yang signifikan, terutama pada masa-masa awal pemenjaraan. Penelitian menunjukkan bahwa kehilangan kebebasan, keterpisahan dari keluarga, perubahan rutinitas hidup, serta keterbatasan dalam menjalankan peran sosial sering kali menjadi sumber tekanan psikologis yang dapat memunculkan kecemasan, stres, bahkan depresi klinis pada warga binaan (Cunha dkk., 2023). Pada WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi, tekanan tersebut berpotensi menjadi lebih berat karena mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi pemenjaraan, tetapi juga harus berhadapan dengan kehilangan status sosial, perubahan identitas diri, serta stigma yang muncul sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan.

Berbagai tekanan tersebut dapat memengaruhi cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Salah satu aspek psikologis yang rentan terdampak adalah harga diri (*self-esteem*). Harga diri merupakan evaluasi individu terhadap keberhargaan dan kompetensi dirinya secara keseluruhan (Mruk, 2006). Dalam lingkup masyarakat, harga diri menjadi aspek yang penting karena berkaitan dengan kemampuan individu untuk mempertahankan pandangan positif terhadap dirinya meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa harga diri berperan dalam kesehatan mental, kemampuan penyesuaian diri, serta kesejahteraan psikologis warga binaan selama menjalani masa pidana. Individu dengan harga diri yang lebih baik cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih positif serta risiko yang lebih rendah mengalami berbagai permasalahan kesehatan mental selama menjalani masa pidana (Annett dkk., 2023). Baron & Byrne (2003) menjelaskan bahwa harga diri merupakan hasil evaluasi individu terhadap dirinya yang berada pada rentang positif hingga negatif. Individu yang memiliki harga diri tinggi cenderung menunjukkan kemampuan coping yang lebih adaptif, lebih resilien dalam menghadapi tekanan, serta memiliki risiko yang lebih rendah mengalami dampak psikologis negatif ketika menghadapi situasi yang menekan (Amestoy dkk., 2023; Li dkk., 2023). Kehilangan status sosial, penolakan sosial, dan stigma yang diterima selama menjalani masa pidana dapat mengancam cara individu memandang dirinya. Oleh karena itu, paparan terhadap penilaian sosial yang negatif secara terus-menerus dapat memengaruhi evaluasi diri dan berpotensi menurunkan harga diri individu (Utami, 2018).

Dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut, individu memerlukan kemampuan untuk beradaptasi secara positif terhadap situasi yang sulit. Kemampuan tersebut dikenal sebagai resiliensi, yaitu kapasitas individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri secara adaptif ketika menghadapi kesulitan maupun tekanan hidup (Reivich & Shatte, 2002). Individu yang memiliki resiliensi tinggi cenderung mampu mengelola emosi secara lebih efektif,

mempertahankan optimisme, serta mengembangkan strategi pemecahan masalah yang adaptif ketika menghadapi situasi yang menekan (Riza & Herdiana, 2013). Dalam lingkup WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi, resiliensi menjadi sumber daya psikologis yang penting karena mereka harus menghadapi berbagai kehilangan dan perubahan secara bersamaan. Ketika sumber daya eksternal seperti status sosial, kekuasaan, maupun pengaruh sosial yang sebelumnya dimiliki mengalami penurunan, kemampuan untuk bertahan menjadi semakin bergantung pada sumber daya psikologis internal individu (Masten, 2001).

Secara teoretis, resiliensi dipandang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya harga diri. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa harga diri memiliki keterkaitan dengan resiliensi. Individu yang memiliki harga diri yang baik cenderung lebih mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dibandingkan menghindarinya (Santrock, 2011). Hal ini sejalan dengan pandangan Henderson dan Milstein (dalam Desmita, 2010) yang menjelaskan bahwa salah satu karakteristik individu yang resilien adalah memiliki kepercayaan diri dan penghargaan yang positif terhadap dirinya. Individu yang berhasil mengatasi kesulitan dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan cenderung mengembangkan keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pengalaman keberhasilan dalam menghadapi tekanan tersebut dapat memperkuat perasaan kompeten dan berharga sehingga membentuk evaluasi diri yang lebih positif (Mruk, 2006). Sebaliknya, individu yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari tekanan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya cenderung lebih rentan mengembangkan penilaian negatif terhadap dirinya. Dengan demikian, semakin tinggi resiliensi yang dimiliki individu, semakin besar pula kemampuannya untuk mempertahankan harga diri dalam situasi yang penuh tekanan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destriana (2017) dan Wasono (2019) menunjukkan bahwa resiliensi memiliki pengaruh positif terhadap harga diri. Individu yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari tekanan, mengelola emosi secara adaptif, serta

mempertahankan optimisme cenderung menunjukkan evaluasi diri yang lebih positif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa resiliensi tidak hanya berperan dalam membantu individu untuk menghadapi kesulitan, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya harga diri yang lebih baik.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian mengenai hubungan antara resiliensi dengan harga diri pada WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada populasi remaja dan WBP dengan kasus pidana umum (Feoh dkk., 2021; Husen & Aulia, 2024; Masnina dkk., 2017). Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan resiliensi dan harga diri pada WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik populasi ini berbeda karena adanya pengalaman kehilangan status sosial, perubahan identitas diri, serta stigma yang berpotensi menimbulkan tantangan adaptasi psikologis yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui hubungan antara resiliensi dengan harga diri pada warga binaan kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana hubungan antara resiliensi dengan harga diri pada warga binaan kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis keterkaitan antara resiliensi dengan harga diri pada warga binaan kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

## **2. Tujuan Khusus**

Menggambarkan resiliensi serta harga diri yang dimiliki oleh subjek penelitian.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian psikologis mengenai hubungan resiliensi dan harga diri pada kelompok dengan karakteristik khusus.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membantu memahami kondisi psikologis diri, terutama kemampuan menghadapi tekanan bagi WBP perempuan kasus tindak pidana korupsi.
- b. Membantu memahami dukungan emosional yang dibutuhkan warga binaan dan meningkatkan peran keluarga sebagai sumber dukungan sosial.
- c. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi rujukan tambahan terkait dinamika resiliensi dan harga diri di lingkungan masyarakat.